

STRATEGI DESAIN RUANG PUBLIK SEBAGAI ALTERNATIF PENANGANAN KONFLIK PADA PEMANFAATAN RUANG PESISIR TELUK PALU

Fuad Zubaidi

Email: fhoead@yahoo.co.id

Abstrak

Merancang dan menata ruang publik kota sebagai pusat aktivitas masyarakat, memerlukan kerangka konseptual yang integratif dengan pendekatan hubungan perilaku dan lingkungan. Beberapa kasus terbukti, bahwa ruang publik akhirnya menjadi ruang mati, terdistorsi karena bertumpuk-tumpuknya fungsi dan menyebabkan terjadinya konflik pemanfaatan ruang. Untuk mengatasi persoalan tersebut ada beberapa aspek yang dapat digunakan dalam pengembangan ruang publik, yaitu mengembangkan strategi konsep pengembangan ruang terbuka yang humanist, pengembangan peraturan dalam ruang publik, pengembangan pemaknaan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Tujuan utama pembahasan ini adalah mengembangkan konsep penataan ruang publik yang berdasarkan studi perilaku guna memberikan hak atas ruang bagi pengguna publik ruang baik pengunjung serta pejalan kaki dan menjamin terpenuhinya kebutuhan fisiologis di dalam ruang tersebut untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, keselamatan, kesenangan, kesinambungan, kelengkapan, daya tarik dan yang terpenting adalah untuk menghindari konflik pemanfaatan ruang.

Penelitian dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu mengembangkan konsep penataan ruang publik berbasis perilaku lingkungan yang menunjukkan adanya indikasi konflik penggunaan ruang dengan pembentukan teritori ruang (tahap I) dan mengembangkan strategi model penataan ruang publik (tahap II), selanjutnya melakukan sosialisasi dan mengembangkan strategi serta model perancangan ruang publik berupa guidelines acuan perancangan untuk di terapkan di ruang publik pada lokasi penelitian dan beberapa ruang publik kota lainnya.

Kata kunci : Bangunan tradisional Souraja, , Kenyamanan, Kondisi termal

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kebutuhan akan ruang terbuka publik secara universal sangat dibutuhkan oleh manusia terkait dengan berbagai macam aktivitas yang dilakukan oleh manusia sebagai interaksinya dengan lingkungannya yang menjadi wadah tempat manusia beraktivitas. Konflik yang terjadi di ruang publik perkotaan pada kawasan pertumbuhan ekonomi, termasuk pada wilayah penelitian selama ini disebabkan pola pengembangan perkotaan yang terkotak-kotak termasuk pengembangan yang dilakukan hanya dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Secara sederhana konflik muncul ketika kondisi ideal yang kita inginkan tidak sesuai dengan

kenyataan yang ada. Pembangunan fisik didesain kadang berdiri sendiri dan satu sama lain secara makro tidak terintegrasi.

Kawasan pesisir teluk Palu khususnya di ruang-ruang publik pesisir pantai Talise mempunyai daya tarik sebagai kawasan komersial, wisata dan berbagai macam aktivitas yang ada. Kriteria ruang publik yang baik biasanya dikaitkan dengan keseimbangan dinamis antara aktivitas publik dan privat dalam kehidupan bersama, berdasarkan hal tersebut melihat kondisi ruang publik di kawasan pesisir pantai teluk Palu masih jauh dari kriteria ruang publik yang ideal hingga perlu rancangan dan penataan kembali dengan kerangka konseptual yang integratif dan berdasar pada pendekatan hubungan

perilaku dan lingkungan. Selain itu untuk mengatasi persoalan tersebut ada beberapa aspek yang dapat digunakan dalam pengembangan ruang publik, yaitu mengembangkan strategi konsep pengembangan ruang terbuka yang humanis, pengembangan peraturan dalam ruang publik, pengembangan pemaknaan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Tujuan Penelitian

Hasil yang ditargetkan dari penelitian ini adalah; merancang strategi dan model penataan ruang publik berbasis perilaku lingkungan guna memberikan hak atas ruang bagi pemanfaatan ruang publik dan menjamin terpenuhinya kebutuhan fisiologis di dalam ruang tersebut untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, keselamatan, kesenangan, kesinambungan, kelengkapan, daya tarik dan meminimalkan potensi konflik pemanfaatan ruang, yang selanjutnya dapat dijadikan strategi serta acuan dalam merancang dan menata ruang publik di kawasan pesisir teluk Palu dan dapat dijadikan acuan untuk mendesain beberapa ruang publik kota.

Dengan strategi dan acuan tersebut diharapkan pada desain dan pemanfaatan ruang publik dapat menjamin terpenuhinya hak bagi masyarakat pengguna ruang publik berupa kebutuhan fisik dan fisiologis serta dapat meminimalkan bahkan mencegah terjadinya konflik penggunaan ruang serta terjadinya perilaku anarkis ruang yang berujung pada tindakan vandalisme.

TINJAUAN PUSTAKA

Fungsi Ruang Publik

Ruang publik adalah wadah yang menampung segala aktifitas masyarakat dilingkungan tersebut secara individu maupun kelompok. Perencanaan dan perancangan ruang terbuka publik dalam satu kawasan, dikatakan berhasil jika ruang terbuka tersebut

dapat dimanfaatkan oleh pengguna dan ketika setting yang ada menjadi bagian dari kehidupan mereka. Menurut Carr, (1992) kondisi ini bisa dicapai bila :

1. Terjadi keserasian didalam sebuah *public space*, secara fisik maupun sosial.
2. *Public Space* mendukung berbagai macam aktivitas yang diinginkan oleh pengguna.
3. *Public Space* mampu memberikan rasa nyaman, aman dan terciptanya hubungan dengan orang lain.

Memperhatikan kondisi tersebut, maka menurut Carr, suatu pemanfaatan ruang publik yang baik, apabila mempunyai 3 kriteria :

- a. Ruang yang tanggap (*responsive space*), yaitu ruang yang dirancang untuk memenuhi kebutuhannya, misalnya kenyamanan fisik, relaksasi, komunikasi aktif pasif.
- b. Ruang yang demokratik (*demokratik space*), yaitu yang dapat melindungi hak pengguna ruang publik, seperti kemudahan aksesibilitas fisik, visual (kebebasan pandangan), simbolis, kebebasan beraktifitas, serta rasa memiliki dan menempati.
- c. Ruang yang bermakna (*meaningful space*), yang memberikan keterkaitan pengguna secara fisik dan sosial dengan ruang tersebut, baik berhubungan dengan kesejarahan, mendukung beragam aktifitas pengguna, perasaan aman dan nyaman atau keterkaitan dengan peristiwa lainnya.

Hubungan Perilaku dan Ruang Publik

Perilaku manusia dalam hubungannya terhadap suatu setting fisik berlangsung dan konsisten sesuai waktu dan situasi. Karenanya pola perilaku yang khas untuk setting fisik tersebut dapat diidentifikasi.

Dari data yang didapat pada riset perilaku tidak dimaksudkan bahwa asumsi itu hanya

sebagian benar, tapi yang lebih penting adalah keyakinan bahwa hal tersebut menyederhanakan pengertian hubungan antara perilaku manusia dan setting fisiknya.

Perilaku manusia akan mempengaruhi dan membentuk setting fisik lingkungannya (Rapoport, 1986), Pengaruh lingkungan terhadap perilaku dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

- 1) **Environmental Determinism**, menyatakan bahwa lingkungan menentukan perilaku masyarakat di tempat tersebut.
- 2) **Environmental Possibilism**, menyatakan bahwa lingkungan fisik dapat memberikan kesempatan atau hambatan terhadap perilaku masyarakat.
- 3) **Environmental probabilism**, menyatakan bahwa lingkungan memberikan pilihan-pilihan yang berbeda bagi perilaku masyarakat.

Pendekatan Perilaku, menekankan pada keterkaitan yang ekletik antara ruang dengan manusia dan masyarakat yang memanfaatkan ruang atau menghuni ruang tersebut. Dengan kata lain pendekatan ini melihat aspek norma, kultur, masyarakat yang berbeda akan menghasilkan konsep dan wujud ruang yang berbeda, adanya interaksi antara manusia dan ruang, maka pendekatannya cenderung menggunakan setting dari pada ruang. Istilah setting lebih memberikan penekanan pada unsur-unsur kegiatan manusia yang mengandung empat hal yaitu : Pelaku, Macam kegiatan, tempat dan waktu berlangsungnya kegiatan

Pada berbagai pendapat dikatakan bahwa desain Behavior Setting yang baik dan tepat adalah yang sesuai dengan struktur perilaku penggunaannya. Dalam desain arsitektur hal tersebut disebut sebagai sebuah proses argumentatif yang dilontarkan dalam membuat desain yang dapat diadaptasikan, Fleksibel atau terbuka terhadap pengguna berdasarkan pola perilakunya.

Konsep Teritori dan Konflik Pemanfaatan Ruang

Berkaitan dengan kebutuhan emosional, konsep teritori berkaitan dengan isu mengenai ruang privat (*personal space*) dan publik, serta konsep mengenai privasi. Sementara berkaitan dengan aspek kultur akan menyangkut isu mengenai area sakral (suci) dan profan (umum).

Teritori menjadi tiga kategori dikaitkan dengan keterlibatan personal, involvement, kedekatan dengan kehidupan sehari-hari individu atau kelompok, dan frekuensi penggunaan. Tiga kategori tersebut adalah : primary, secondary, serta publik territory. Teritori utama (primary) adalah suatu area yang dimiliki, digunakan secara eksklusif, disadari oleh orang lain, dikendalikan secara permanen serta menjadi bagian utama dalam kehidupan sehari-hari penghuninya. Teritori sekunder adalah suatu area yang tidak terlalu digunakan secara eksklusif oleh seseorang /kelompok orang, mempunyai cakupan area yang relatif luas, dikendalikan secara berkala oleh kelompok yang menuntutnya. Teritori publik adalah suatu lingkungan kampung yang batas fisiknya relatif jelas.

Konsep privasi dan teritorial memang terkait erat. Namun definisi privasi lebih ditekankan pada kemampuan individu atau kelompok untuk mengontrol daya visual, auditory, dan olfactory dalam berinteraksi dengan sesamanya. Dalam arti konsep privasi menempatkan manusia sebagai subyeknya bukan tempat /place yang menjadi subyeknya.

Tiap individu mempunyai perbedaan perilaku keruangannya. Perbedaan ini merefleksikan perbedaan pengalaman yang dialami dalam pengelolaan perilaku keruangan sehubungan dengan fungsinya sebagai daya proteksi dan daya komunikasi, yang menyebabkan perbedaan tanggapan ini antara lain jenis kelamin, daya juang, budaya, ego state, status sosial,

lingkungan, dan derajat kekerabatan (affinity) sebagai sub system perilaku. Lebih jauh hal ini akan menentukan kualitas dan keluasan personal space yang dimiliki tiap individu (disamping tentu saja adanya pengaruh schemata, afeksi, perilaku nyata, pilihan tiap individu).

Seperti yang telah dikemukakan, bahwa pada konsep pendekatan perilaku teritorialitas merupakan hal yang sangat mempengaruhi perilaku pada ruang publik, karena pembentukan teritori yang lebih luas dari individu atau kelompok akan menyangkut pula pada hak teritorial individu atau kelompok lainnya. Hal tersebut sering kali membuat terjadinya konflik pada pemanfaatan ruang publik, hingga dalam desain ruang publik harus betul-betul memperhatikan dan menekankan desain pada perilaku teritorialitas.

Banyak individu atau kelompok rela melakukan tindakan agresi demi melindungi teritorinya, maka kelihatannya teritori tersebut memiliki beberapa keuntungan atau hal yang dianggap penting. Kebenaran dari kalimat “*Home Sweet Home*”, telah diuji dalam berbagai eksperimen. Penelitian mengenai teritori primer, sekunder, dan publik menunjukkan, bahwa orang cenderung merasa memiliki kontrol terbesar pada teritori primer, dibanding dengan teritori sekunder maupun teritori publik. Ketika individu mempersepsikan daerah teritorinya sebagai daerah kekuasaannya, itu berarti mempunyai kemungkinan untuk mencegah segala kondisi ketidak nyamanan terhadap teritorinya. Berdasarkan hal tersebut kadang kala pelaku merasa memiliki kontrol terhadap teritori ruang dan hal tersebut diwujudkan dalam satu mekanisme defensif semacam pertahanan terhadap teritorinya. Mekanisme defensif merupakan wujud (fisik maupun non fisik) dari adanya rasa memiliki teritori berupa tindakan fisik penandaan kepemilikan akan

suatu wilayah dari gangguan/intervensi pihak lain.

Mekanisme defensif menurut Brower (1976), dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain: memperjelas batas-batas, memasang penyangga, memasang tanda-tanda larangan secara menyolok mata. Mekanisme defensif ini dapat saja bersifat terang-terangan, misalnya dengan pengawasan langsung terus-menerus terhadap suatu pangkalan militer. Dan dapat juga dilakukan secara halus dengan menjauhkan diri dari gangguan yang tidak diinginkan, misalkan, ruang tamu diaransemen agar pandangan tamu tidak langsung tertuju kedalam ruang tidur.

Mekanisme yang lain adalah dengan meninggalkan tanda-tanda pengenalan diri (personalisasi), misalnya meninggalkan buku di atas meja di dalam ruang baca perpustakaan. Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa mekanisme defensif meliputi kegiatan menghindar, dan mencegah (preventif) dari intervensi pihak lain yang ditandai dengan adanya unsur-unsur penempatan dan keterikatan.

a. Penempatan

Penempatan terhadap suatu tempat dalam pengertian yang paling sederhana adalah adanya kegiatan yang berlangsung pada tempat tersebut, misalnya orang menunggu bis di perempatan jalan. Dalam pengertian yang lebih luas adalah kegiatan tersebut diwujudkan dalam bentuk fisik (hasil kegiatan), yaitu adanya obyek-obyek yang menyatakan bahwa suatu tempat tersebut ditempati, seperti: adanya pagar, papan nama, pot kembang dan sebagainya; atau dengan pemberitahuan tertulis, baik sifat maupun nama pemiliknya. Tanda-tanda penempatan seringkali, tidak menyolok mata atau hanya berupa jejak-jejak fisik, seperti: debu yang dibersihkan, sampah yang tertinggal, atau rerumputan yang terinjak, sehingga jejak-jejak fisik tersebut dapat

menjelaskan adanya personalisasi di suatu tempat.

b. Keterikatan

Keterikatan selalu dihubungkan dengan aspek-aspek simbolis, misalnya jika seseorang memiliki keterikatan yang tinggi terhadap suatu tempat, maka ia akan mempertahankan tempat tersebut. Biasanya tempat yang menjadi obyek keterikatan merupakan tempat yang memiliki nilai tertentu, seperti contoh: sekelompok masyarakat mempertahankan secara mati-matian tanah adat dari intervensi orang lain. Masyarakat tersebut merasa terikat dengan tanah adat itu karena secara turun temurun mereka menempati dan memeliharanya. Dari contoh ini memberikan pengertian bahwa keterikatan tempat tidak hanya mencakup nilai fungsional subyektif tempat saja, tetapi juga menyangkut nilai psikologi persepsi penggunaannya yaitu kebutuhan interaksi sosial dan personalisasi suatu komunitas.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini didasari pada penelitian perilaku serta kaitannya dengan pemanfaatan ruang publik. Metode pengambilan data dilakukan dengan dua cara yaitu dengan pengamatan perilaku (*Observing Behaviour*), dan pengamatan jejak fisik (*Observing Physical Traces*). Disamping kedua hal tersebut ditambahkan dengan metode wawancara. Kedua metode pengamatan tersebut cukup tepat di terapkan dalam penelitian ini, keakuratan dan kredibilitas dapat dicapai dengan pengulangan pengamatan, metode triangulasi.

PEMBAHASAN

Penanganan Konflik Pemanfaatan Ruang

Secara sederhana konflik muncul ketika kondisi ideal yang kita inginkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Kondisi tersebut

terjadi ketika kepentingan masing-masing stakeholder saling bertemu dan berbenturan karena antar-stake holder berinteraksi dan menunjukkan kepentingannya. Konflik dapat dihindari apabila sumber-sumber dan kondisi terjadinya konflik dapat dihindari. Apabila tidak, maka kondisi tersebut akan dapat mengarah pada ketidaksesuaian tujuan-tujuan yang dimiliki oleh masing-masing stakeholder, sehingga muncul konflik laten yang merupakan kondisi potensial menjadi manifestasi konflik dalam bentuk tindakan yang dilakukan oleh satu stakeholder atau lebih. Minnery (1985:4) mengungkapkan empat tahapan konflik yang biasa terjadi, yaitu; konflik yang sifatnya laten (kondisi); konflik dirasakan (dalam tataran kognitif); konflik yang sudah dapat dirasakan (sudah mempengaruhi kita); konflik yang sudah nyata-nyata terjadi. Lebih lanjut Minnery (1987:4) mengungkapkan bahwa, keempat tahapan konflik tersebut, dalam proses pengelolaannya, secara garis besar dapat dikelompokkan dalam dua jenis konflik, yaitu:

- a. Konflik yang di manifestasikan, terjadi karena interaksi antara dua atau lebih pengguna atau stakeholder terpisah yang dapat diidentifikasi, didasarkan pada ketidaksesuaian tujuan-tujuan. Paling sedikit satu stakeholder sadar dan secara aktif berupaya untuk mencapai tujuan-tujuannya untuk memperoleh sumberdaya yang terbatas dan membuat pihak lain sulit untuk melakukan tindakan yang sama dan tindakan tersebut mengurangi nilai hasil pihak lain.
- b. Konflik laten adalah kondisi semua yang tersebut di atas (konflik yang di manifestasikan) tetapi pada tataran ini belum ada tindakan.

Setiap pengelolaan konflik membutuhkan kerangka dasar pertimbangan yang menjadi acuan penanganan konflik. Dasar pertimbangan dalam konteks ini yaitu :

1. *Pemahaman mengenai watak struktural dan fungsional serta perilaku kepentingan pengguna.*
2. *Kejelasan segmen ruang publik dengan fungsinya yang disusun dalam panduan rancang kota.*
3. *Memperjelas pengendalian kepentingan, baik oleh sesama stakeholder sendiri maupun oleh pihak ketiga.*

Seperti halnya pengelolaan konflik yang dikemukakan oleh Minnery (1985:22 1), penyusunan panduan atau standar kinerja atau preskriptif menjadi kesatuan langkah berikut;

1. *Identifikasi dan karakter konflik.*
2. *Penilaian terhadap dampak., apakah menguntungkan atau merugikan*
3. *Penilaian langkah-langkah tindakan.*
4. *Penerapan tujuan atau kondisi yang ingin dicapai setelah penanganan konflik, termasuk penetapan kriteria dan indikatornya.*

Kerangka Integratif Penanganan Konflik

Penggunaan ruang publik secara bersama merupakan bagian integral dan tata tertib sosial sehingga perlu adanya pengendalian terhadap kebebasan tersebut. Dengan kata lain orang tidak bisa memanifestasikan kebebasan tersebut secara maksimal. Semua hak dipandang penting dalam pengendalian penggunaan ruang publik dengan mengingat bahwa prinsip dasar rancangan dan pengelolaan ruang publik yang efektif adalah bagaimana peranan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat diwujudkan dalam ruang publik. Penanganan konflik di dalam ruang publik harus terfokus pada:

1. Mengelola, menyelaraskan tujuan maupun kepentingan masing-masing stakeholder dalam memanfaatkan ruang publik sebagai sumber daya bersama melalui tindakan-tindakan untuk mencapai kondisi yang diharapkan.

2. Memperjelas watak struktural dan fungsional ruang publik untuk membuat prioritas pemanfaatan sebagai acuan menyusun prinsip penanganan peruntukan dan stake holder.
3. Penanganan yang saling menguntungkan dengan membuat pilihan-pilihan tindakan yang diterima oleh setiap pihak stakeholder.

Merancang dan menata ruang publik kota sebagai pusat aktivitas masyarakat, memerlukan kerangka konseptual yang integratif dengan pendekatan hubungan perilaku dan lingkungan. Beberapa kasus terbukti, bahwa ruang publik akhirnya menjadi ruang mati, terdistorsi karena bertumpuk-tumpuknya fungsi dan menyebabkan terjadinya konflik pemanfaatan ruang. Untuk mengatasi persoalan tersebut ada beberapa aspek yang dapat digunakan dalam pengembangan ruang publik, yaitu mengembangkan strategi konsep pengembangan ruang terbuka yang humanist, pengembangan peraturan dalam ruang publik, pengembangan pemaknaan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Strategi perancangan ruang berfungsi untuk memperjelas watak struktural dan fungsional setiap segmen ruang publik. Strategi ini harus memperjelas kepentingan yang diizinkan dalam setiap segmen ruang sebagai upaya preventif munculnya konflik yang ter manifestasi.

Untuk pengendalian, strategi rancangan diarahkan pada terwujudnya hal-hal berikut;

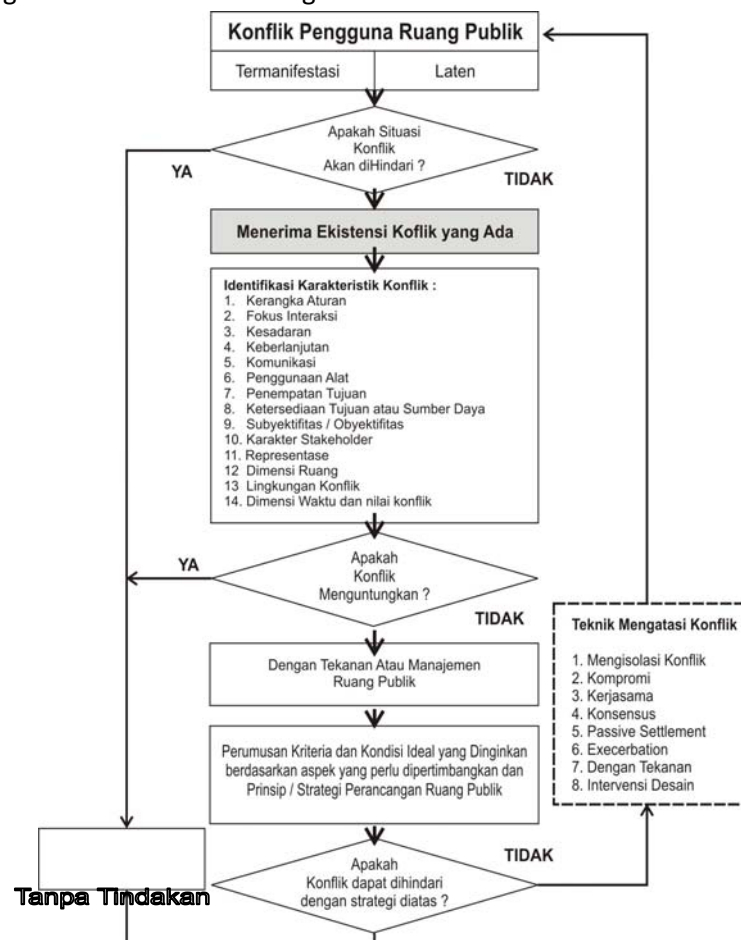
1. *Mengembangkan desain ruang publik untuk mendukung semua aktivitas yang berlangsung di dalamnya..*
2. *Mengelola ruang publik yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan publik.*
3. *Memberikan landasan yang jelas untuk penggunaan dan pengaturan kegiatan di dalam ruang publik berdasarkan perilaku pengguna, watak struktural dan fungsional ruang.*

Kondisi yang ingin dicapai melalui strategi perancangan ruang publik. Dengan demikian, pengelolaan, perancangan dan perencanaan ruang publik yang baik adalah kemampuan untuk mencapai dan memelihara keseimbangan antara hak dan kebutuhan/kepentingan yang berpotensi menimbulkan konflik.

Sumber konflik bila dikaji secara mendalam tidak hanya bersumber pada keterbatasan atau ketidakseimbangan antara ruang/sumberdaya yang tersedia dengan kebutuhan. Konflik juga dapat bersumber pada proses interaksi antar pengguna /stakeholder sampai pada perilaku pengguna/stakeholder. Oleh karena itu pada tahap awal dibutuhkan penilaian apakah situasi konflik yang terjadi ruang publik perlu dihindari atau ditekan sebelum dilakukan identifikasi yang lebih mendalam mengenai

karakteristik konflik. Kemudian setiap konflik harus dinilai apakah memberi manfaat atau tidak, untuk menentukan langkah-langkah penyelesaian.

Desain / rancangan ruang publik (termasuk prinsip perancangan) tidak selalu dapat memecahkan konflik (desain hanya salah satu perangkat penyelesaian konflik). Namun demikian, strategi perancangan merupakan elemen penting dan dasar untuk resolusi konflik. Bagaimanapun juga penanganan konflik oleh stake holder yang terlibat atau pihak ketiga membutuhkan dasar acuan yaitu strategi / rancangan ruang publik. Strategi perancangan ruang publik harus menjadi kesatuan langkah penanganan konflik yang secara struktural dapat dilihat pada skema berikut:



Gambar 1. Skema Penanganan Konflik

KESIMPULAN

1. Permasalahan konflik pemanfaatan ruang publik pada dasarnya juga merupakan permasalahan perilaku ruang, diperlukan pendekatan perilaku dalam desain ruang publik, karena dalam ruang publik menampung segala macam aktifitas masyarakat, dari sekadar bersantai, olahraga, ataupun kegiatan lainnya atau dengan kata lain bahwa dalam ruang publik menampung kegiatan yang heterogen dengan pelaku yang heterogen pula.
2. Konsep teritori yang digunakan sebagai sebuah fokus pendekatan perilaku dalam mendesain ruang publik merupakan faktor yang sangat mempengaruhi pola kegiatan dan pelaku kegiatan di ruang publik.
3. Ruang publik sebagai teritori bersama, sangat esensial keberadaannya bagi masyarakat, oleh karena itu desain ruang publik harus mampu menampung aspirasi serta kebutuhan masyarakat sebagai pengguna agar ruang publik dapat dimanfaatkan dengan baik dengan rasa aman, nyaman serta mampu mendorong interaksi antar sesama pengguna.
4. Ruang publik harus bersifat fungsional sesuai dengan fungsinya, tetap mempertahankan nilai estetika dengan memperhatikan karakter khas yang dimiliki, dan respon terhadap lingkungan serta perilaku lingkungan yang saling mempengaruhi.

DAFTAR PUSTAKA

Carr, Stephen, et al, 1992, Public Space, Cambridge University Press, Australia.

Gifford, R. 1987, Environmental Psychology : Principle and Practice, Boston : Allyn and Bacon. Inc

Halim, Deddy, 2005, Psikologi Arsitektur pengantar kajian lintas disiplin, Grasindo, Jakarta

Haryadi, Setiawan. B., 1995, Arsitektur Lingkungan dan Perilaku, Proyek Pengembangan Pusat studi Dirjen Dekbud. Yogyakarta.

Lang. Jhon, Burnette. Charles, Molesky. Walter, Vachon. David, 1974, Designing for Human Behaviour : Architecture and the Behavioral Sciences, Dowden, Hutchinson and Ross, Inc, Pennsylvania.

Laurens, J.M., 2004, Arsitektur dan Perilaku Manusia, Grasindo, Surabaya

Minnery, John, R. 1985. Conflict Management in Urban Planning. Hampshire: Gower Publishing Company Limited.

Porteous, J. Douglas, 1976, Environment And Behavior, Addison Wesley Publishing Company, England

Rapoport, A., 1986, The Use and design of open space in urban neighborhoods, di D Frick eds The Quality of urban life, Berlin

Sommer. Robert and Sommer. Barbara, 1980, A Practical Guide to Behavioral Research : Tools and Techniques, Oxford University Press, New York.

Weissman, Gerald, D., 1985, Modeling Environmental Behavior System, A Brief Note, Journal of Man Environment Relation, Vol. 1. No. 2 The Pennsylvania State University.

Zubaidi, Fuad, 2009, Ruang dan Teritorialitas pada Kawasan Ruang Publik Pantai Talise palu, Prosiding “KeBhinekaan Ruang Arsitektur Nusantara “Jurusan Teknik Arsitektur ITS Surabaya ISBN : 978-979-3334-09-7, Surabaya

Zubaidi, Fuad, 2007, Pembangunan Wilayah Pesisir Teluk Palu dan Masalah Lingkungan Hidup, Jurnal Inspirasi Nomor III Januari 2007/ ISSN : 1858-425X, Palu